

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah cerminan kebijakan Pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Ketersediaan barang dan jasa publik di daerah diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk meningkatkan hasil pembangunan.

Dengan wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban atas distribusi dan alokasi sumber daya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Jhingan (2008) bahwa belanja Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan, serta menjaga keseimbangan perekonomian daerah. Menurut Suparmoko (1994), pengeluaran Pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran adalah investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
- b. Pengeluaran dapat memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.

- c. Penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Meningkatkan kesempatan kerja dan daya beli.

Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah sebagian besar mencakup penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja. Pengelolaan anggaran tersebut terkait dengan alokasi pengeluaran Pemerintah (redistribusi pendapatan) dalam menyediakan barang dan jasa publik sesuai dengan pendapatan yang diterima (Hyman, 2010). Dalam ekonomi publik, konsep ini dikenal dengan istilah *public choice* yang berarti alokasi kuantitas barang dan jasa publik yang disediakan oleh Pemerintah diputuskan melalui proses politik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi asli daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Selanjutnya Dana perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan Dana Desa. Keseluruhan penerimaan tersebut merupakan sumber pendapatan yang dapat didistribusikan kembali untuk masyarakat, dalam bentuk barang dan jasa publik. Sedangkan pada sisi pengeluaran, belanja Pemerintah Daerah terbagi menjadi

beberapa jenis belanja daerah, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal.

Kajian empiris tentang dampak desentralisasi fiskal, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, terhadap pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesimpulan yang berbeda, beberapa penelitian menunjukkan dampak negatif, sedangkan penelitian lain ada yang menunjukkan dampak positif. Dalam menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, Breuss dan Eller (2004) berpendapat ada beberapa permasalahan statistik yaitu :

1. Masalah spesifikasi model
2. Ukuran desentralisasi fiskal (pendapatan dan pengeluaran daerah) belum dapat menggambarkan desentralisasi secara menyeluruh termasuk aspek struktural, pengambilan keputusan, sumber daya proses politik, dan kelembagaan
3. Tidak ada gambaran yang jelas mengenai hubungan sebab akibat antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Aziz (2009) melakukan penelitian serupa untuk kasus di Indonesia, Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jika peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini banyak daerah yang tingkat kemandiriannya masih rendah, dimana penerimaan dari sektor Dana

Alokasi Umum (DAU) lebih besar dibandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu cara yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menyediakan barang dan jasa publik yang sesuai kualitas dan kebutuhan masyarakat. Menurut Halim (2004), daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merekonstruksi struktur belanja untuk meningkatkan pertumbuhannya. Tetapi penerimaan Pemerintah yang dipungut melalui pajak secara berlebihan dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah justru cenderung mengalami *economic downturn*.

Menurut Widmalm (2001), struktur pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, ada korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak yang meningkat dengan mengenakan pajak penghasilan pribadi. Menurut teori Peacock dan Wiseman, Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak (Mangkoesobroto, 2010). Engen dan Skinner (1996) berpendapat bahwa penerapan kebijakan peningkatan penerimaan pajak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Menurut beberapa penelitian (Hasan, 2015; Pujiati, 2006; Santosa, 2013; Hendriwiyanto, 2015) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Banyak daerah di Indonesia memiliki proporsi penerimaan Dana Alokasi Umum yang lebih besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya (Adi, 2005). Dalam pengelolaan keuangan, proporsi ini menunjukkan bahwa ada ketergantungan yang besar pada alokasi dana dari Pemerintah Pusat.

Daerah yang bergantung terhadap dana dari Pemerintah Pusat, tingkat pertumbuhan ekonominya cenderung lebih rendah dan begitu juga dengan kemandirian daerahnya. Di sisi lain, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi atau tingkat ketergantungan dana perimbangan yang rendah dari Pemerintah Pusat cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemandirian daerah yang tinggi. Setiyawati dan Hamzah (2007) menemukan hasil penelitian yang berbeda yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Selain pendapatan, pengeluaran Pemerintah Daerah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara Pemerintah mengatur perekonomian daerahnya adalah melalui pengeluaran Pemerintah Daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam perekonomian merupakan kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan dapat mempengaruhi dinamika perekonomian lokal. Wagner (1890) menyatakan bahwa pengeluaran Pemerintah menunjukkan tingkat pendapatan Pemerintah. Pengeluaran Pemerintah adalah Anggaran atau biaya yang sedang atau akan dikeluarkan Pemerintah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan ekonomi Pemerintah.

Belanja modal dari anggaran Pemerintah Daerah beberapa diantaranya digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pada bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat di daerah diharapkan dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah, karena secara geografis Pemerintah Kabupaten/Kota adalah otoritas yang paling dekat dengan lokasi keberadaan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik (Khusaini, 2006). Ketersediaan infrastruktur yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007). Seperti yang dinyatakan juga oleh Lin dan Liu (2000), Pemerintah harus meningkatkan investasi modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Attari dan Javed (2013) menyatakan bahwa pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang searah, pengeluaran Pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tidak sebaliknya. Melalui pengeluaran Pemerintah, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Pemerintah.

Ismail et.al (2014) menyatakan bahwa kebijakan negara yang mengutamakan pengeluaran untuk investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang dan jangka pendek. Pengeluaran Pemerintah khususnya belanja investasi diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang artinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Akibatnya peningkatan kesejahteraan rumah tangga atau peningkatan pendapatan

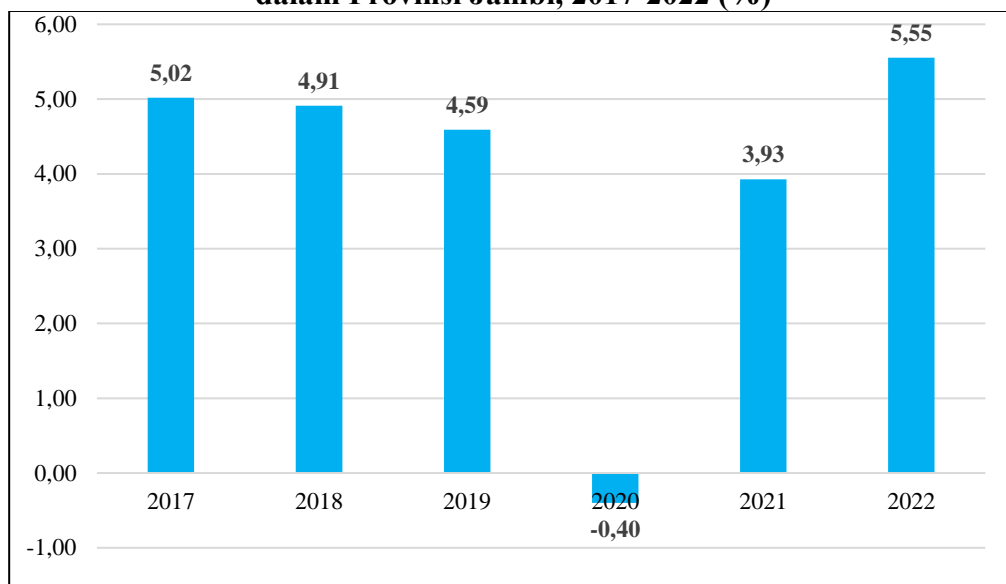
akan menyebabkan peningkatan konsumsi, Tabungan dan investasi. Berbeda dengan Hartati (2012), penelitiannya menemukan bahwa belanja Pemerintah berpengaruh rendah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Selaint itu, penelitian Aziz (2009) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah seharusnya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk bisa lebih mandiri. Dengan penerapan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus dapat memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bergantung pada dukungan dari Pemerintah Pusat. Tetapi otonomi daerah yang telah diterapkan di setiap daerah, terutama di Kabupaten dan Kota di Indonesia masih menimbulkan pertanyaan baru karena potensi fiskal antar daerah berbeda. Hal ini disebabkan oleh bagaimana masing-masing daerah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan otonomi daerah.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah Provinsi Jambi memiliki sistem Pemerintahan yang didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian dipernahui menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengelola pembangunan sesuai kewenangannya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini

berarti bahwa Provinsi Jambi dan seluruh Kabupaten dan Kota di wilayahnya merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota
dalam Provinsi Jambi, 2017-2022 (%)



Sumber : BPS, 2023 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi sejak tahun 2017 - 2020 cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi meningkat 3,93% pada tahun 2021 dan Kembali meningkat 5,55% pada tahun 2022.

Menurut Saleh (2003), salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kemandirian Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi.

Berdasarkan Tabel 1.1, total penerimaan pendapatan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi meningkat setiap tahunnya. Dibandingkan jenis pendapatan lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang kontribusi rata-rata tahunan sebesar 18,24%. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi disumbang 77,65% oleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Ini menunjukkan bahwa secara administratif Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi masih belum mandiri secara fiskal karena sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar pada sektor Pendapatan Asli Daerah, kontribusi rata-rata sebesar 64,52% dari total Pendapatan Asli Daerah, atau 11,79% dari pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi di seluruh Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi pada tahun 2022 rata-rata sekitar 5,55% dengan pertumbuhan masing-masing daerah yang berbeda. Terdapat profil daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah, namun hal ini tidak selalu mencerminkan tingkat penerimaan pendapatan daerah yang sebanding. Sebagai contoh, Kota Jambi memiliki pendapatan daerah tertinggi pada tahun 2022, akan tetapi kota tersebut bukan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi. Hal ini menarik karena meskipun memiliki pendapatan daerah tertinggi, tetapi tidak mencerminkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

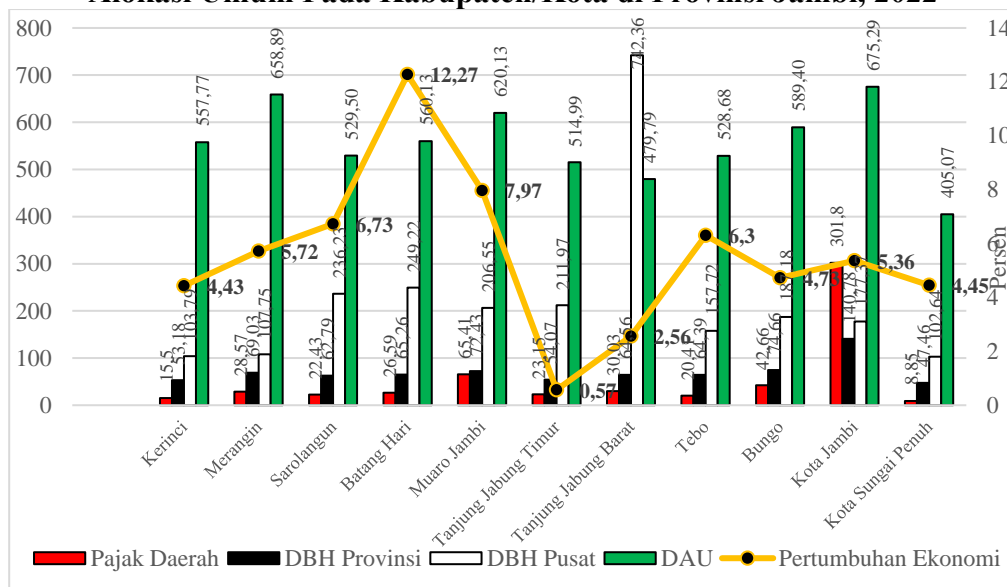
Tabel 1.1.
Pendapatan Daerah di Provinsi Jambi
Berdasarkan Jenis Pendapatannya, 2018 – 2022

No.	Jenis Pendapatan	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%
I	Pendapatan Asli Daerah	2.859,65	17,87%	2.868,83	17,71%	2.949,17	17,52%	2.738,82	17,43%	3.276,62	19,21%	3.498,28	19,74%
	a. Pajak Daerah	1748,08	10,92%	1.882,59	11,62%	1.853,48	11,01%	1.751,91	11,15%	2.074,22	12,16%	2.457,25	13,86%
	b. Retribusi Daerah	116,48	0,73%	99,13	0,61%	104,62	0,62%	94,90	0,60%	99,97	0,59%	89,11	0,50%
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	104,77	0,65%	114,81	0,71%	121,49	0,72%	120,05	0,76%	122,67	0,72%	136,18	0,77%
	d. Lain-Lain PAD yang sah	890,33	5,56%	772,31	4,77%	869,57	5,16%	771,96	4,91%	979,76	5,75%	815,74	4,60%
II	Pendapatan Transfer	13.074,41	81,70%	13.224,64	81,63%	13.887,00	82,48%	12.956,49	82,44%	13.494,39	79,13%	14.109,09	79,60%
A	Dana perimbangan	12557,06	78,47%	12.644,87	78,05%	13.596,08	80,76%	12.325,38	78,42%	12.776,85	74,93%	13.340,47	75,26%
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	934,37	5,84%	725,99	4,48%	704,47	4,18%	652,18	4,15%	1.226,64	7,19%	987,24	5,57%
	b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1021,69	6,38%	1.165,24	7,19%	1.523,43	9,05%	1.129,46	7,19%	1.050,10	6,16%	2.167,00	12,22%
	c. DAU	7957,6	49,73%	7.969,27	49,19%	8.301,92	49,31%	7.502,96	47,74%	7.402,17	43,41%	7.404,53	41,77%
	d. DAK	2643,4	16,52%	2.784,37	17,19%	3.066,26	18,21%	3.040,78	19,35%	3.097,94	18,17%	2.781,70	15,69%
B	Bagi Hasil Pajak Provinsi	517,35	3,23%	579,77	3,58%	290,92	1,73%	631,11	4,02%	717,54	4,21%	768,62	4,34%
III	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69,14	0,43%	107,75	0,67%	-	0,00%	21,39	0,14%	281,82	1,65%	118,72	0,67%
	Jumlah	16.003,20	100,00%	16.201,22	100,00%	16.836,17	100,00%	15.716,70	100,00%	17.052,83	100,00%	17.726,09	100,00%

Sumber: DJPK.Kemenkeu, 2023 (Data Diolah)

Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun adalah beberapa daerah di Provinsi Jambi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022. Secara umum dari sisi pendapatan daerah, Dana Alokasi Umum adalah sumber penerimaan daerah terbesar bagi hampir seluruh Kabupaten/Kota tersebut. Berbeda dengan Kota Jambi, meskipun pertumbuhan ekonominya sebesar 5,36%, Kota Jambi memiliki pendapatan daerah dari sektor pajak yang paling tinggi dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi, ini mungkin disebabkan karena populasi penduduk yang lebih besar dan besarnya kapasitas ekonomi Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi yang lebih tinggi sebagai ibu kota Provinsi Jambi.

Gambar 1.2.
Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, DBH Pusat, DBH Provinsi dan Dana Alokasi Umum Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022



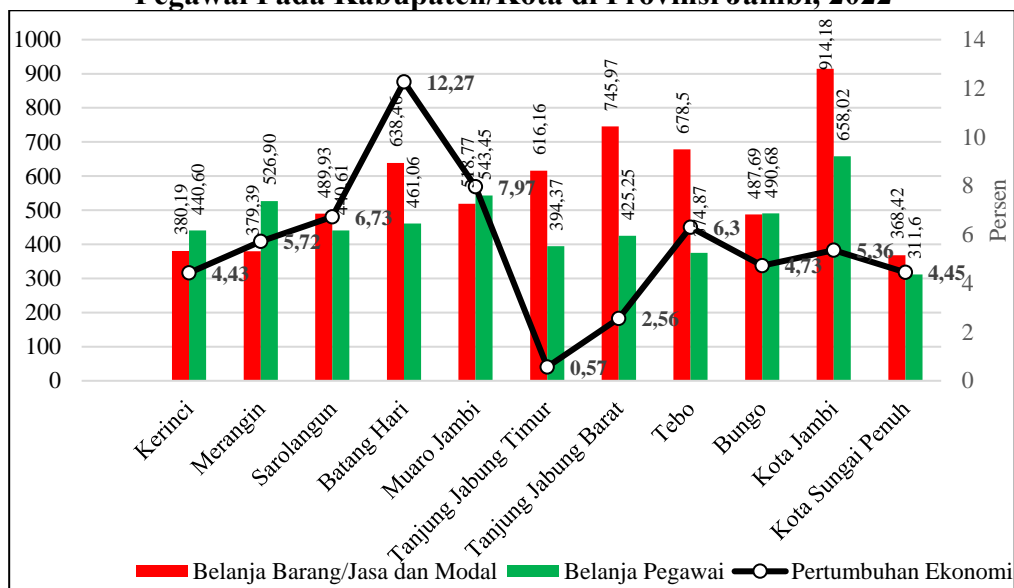
Ket: Pertumbuhan ekonomi dalam persen, sedangkan lainnya dalam milyar rupiah
 Sumber: DJPK.Kemenkeu dan BPS Provinsi Jambi, 2023 (Data Diolah)

Dengan adanya penerimaan pajak daerah tersebut, tentunya akan menjadi sumber dana potensial untuk mencapai tujuan kebijakan program Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengeluaran Pemerintah yang berguna untuk memenuhi

kebutuhan pengadaan barang dan jasa publik serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Pengeluaran Pemerintah Daerah harus dikelola secara tepat sasaran melalui mekanisme kebijakan belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan data BPKPD Provinsi Jambi pada tahun 2022 (Gambar 1.3), pengeluaran utama Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah bukan belanja barang/jasa dan modal. Di beberapa daerah anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun perbedaan anggaran belanja sangat kecil, ini menunjukkan bahwa masih ada Kabupaten dan Kota yang memiliki jumlah anggaran terbatas untuk belanja barang/jasa dan modal.

Gambar 1.3.
Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Barang/Jasa dan Modal, dan Belanja Pegawai Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022



Ket: Pertumbuhan ekonomi dalam persen sedangkan lainnya dalam milyar rupiah.

Sumber: DJPK.Kemenkeu dan BPS Provinsi Jambi, 2023 (Data Diolah)

Di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki kapasitas APBD terbesar. Anggaran belanja barang/jasa dan modal pada tahun 2022 sebesar 914,18 Milyar Rupiah dan belanja pegawai sebesar 658,02 Milyar Rupiah. Walaupun anggaran belanja Pemerintahnya tertinggi, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi masih lebih rendah dibandingkan oleh Kabupaten Batang Hari atau Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun kecenderungan tingkat pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi hampir sama, namun ada perbedaan dalam realisasi penerimaan pendapatan daerah baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah, maupun dari Dana perimbangan serta realisasi pengeluaran Pemerintah Daerah yang berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

Dari data pertumbuhan ekonomi dan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, kita dapat menyimpulkan beberapa fenomena yang menarik. Tidak ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu akan lebih rendah atau lebih tinggi dari pada daerah lain karena tingginya pendapatan daerah, termasuk tingginya pajak daerah. Begitu juga dengan belanja daerah, belanja yang tinggi tidak selalu termanifestasikan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian pola belanja di setiap Kabupaten dan Kota juga relatif sangat berbeda. Akumulasi belanja barang/jasa dan belanja modal jauh lebih tinggi di atas belanja pegawai untuk Kota Jambi.

Jika fenomena yang ditemukan di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi dikaitkan dengan temuan penelitian terdahulu, maka fenomena tersebut menarik untuk dielaborasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, belum ada pola yang jelas antara penerimaan atau pengeluaran dengan pertumbuhan ekonomi

daerah di Provinsi Jambi. Penelitian terdahulu yang mengkaji persoalan yang sama menemukan hasil yang cukup beragam. Karena alasan ini peneliti tertarik untuk mengulas persoalan yang sama dengan mengambil Provinsi Jambi sebagai kasus empirik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap lebih dalam bagaimana hubungan antara struktur penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota.

Secara khusus penelitian ini tidak berfokus pada dampak kemandirian fiskal suatu daerah seperti yang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada dampak penerimaan pendapatan daerah, terutama yang terkait dengan potensi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan. Penerimaan daerah yang terkait dengan potensi pajak meliputi tiga macam, yaitu: Pajak Daerah (PD), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Pajak Prov), dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pajak Pusat). Ketiga jenis penerimaan ini menjadi perhatian karena nilainya pada akhirnya didasarkan oleh potensi masing-masing daerah serta upaya atau peran strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Diluar tiga variabel tersebut, penelitian ini juga mempertimbangkan dampak penerimaan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dilakukan karena Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki kontribusi yang sangat besar bagi APBD Kabupaten/Kota, tetapi besaran Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terkait secara langsung dengan upaya dan peran strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemanfaatan potensi riil daerahnya.

Pengklasifikasian variabel belanja didasarkan pada Jenis Belanja yang dipisahkan ke dalam tiga jenis belanja, yakni: Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Peneliti memilih mengkategorikan belanja menurut jenis dan bukan menurut kelompok. Belanja Pegawai secara ekonomi dipandang sebagai belanja yang bersifat konsumtif dan masa pakainya pendek, sedangkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dipandang sebagai belanja yang bersifat produktif dan masa pakainya lebih panjang. Dengan demikian, dalam penelitian ini hanya ada dua variabel belanja, yaitu: Belanja Pegawai (BP) dan Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM).

Untuk menghubungkan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi penelitian ini menggunakan belanja daerah, sehingga belanja daerah diposisikan sebagai variabel mediator (intervening). Pertimbangannya adalah ketika Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh penerimaan pendapatan yang kemudian tercatat dalam APBD, sampai tahap ini penerimaan tersebut belum berdampak pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketika penerimaan tersebut dibelanjakan, maka pada saat itulah penerimaan daerah mulai memiliki pengaruh terhadap kegiatan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, dapat disarikan beberapa hal yang penting. Banyak peneliti yang melakukan pengujian mengenai hubungan antara pendapatan dan belanja serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah (Kabupaten/Kota) atau regional (Provinsi) maupun

nasional. Hasil yang diperoleh pun juga beragam, beberapa saling bersesuaian dan ada yang saling bertentangan.

Menurut analisis deskriptif yang sederhana, apa yang diuji oleh para peneliti sebelumnya tampak terjadi di Provinsi Jambi. Penerimaan pendapatan daerah yang tinggi, tidak serta merta berarti pertumbuhan ekonominya lebih rendah atau lebih tinggi dari pada Kabupaten/Kota lainnya. Hal yang sama berlaku untuk sisi belanjanya, karena tidak semua belanja yang tinggi diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Secara teori, pendapatan daerah pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, tetapi belanja daerah merupakan berkah bagi perekonomian. Oleh karena itu pendapatan dan belanja seharusnya memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan. Penerimaan yang masih tersimpan tunai dalam dompet atau brankas tidak berpengaruh terhadap siklus kegiatan ekonomi sehari-hari. Kemudian ketika pendapatan itu benar-benar dibelanjakan, pengaruhnya terhadap kegiatan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian ini mempertimbangkan pengeluaran belanja daerah sebagai variabel penghubung antara penerimaan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya dan masih samarnya fenomena yang terjadi di setiap daerah di Provinsi Jambi, serta adanya model pola pikir konseptual tentang hubungan antara pendapatan, belanja, dan pertumbuhan ekonomi, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
2. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
3. Menganalisis pengaruh Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
4. Menganalisis pengaruh Pajak Daerah, DBH Pajak (Provinsi dan Pusat), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota melalui

Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Penelitian ini meningkatkan pemahaman teori ekonomi publik tentang peran Pemerintah, khususnya hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penelitian ini penting untuk membantu pengambil kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan menggunakan konsep dan variabel lain yang belum dapat dilakukan pada penelitian ini. Berbagai variabel atau indikator dalam penelitian tentang pengaruh pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan hasil yang berbeda.